

**PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI
KECAMATAN BATU AJI OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
BATAM**

SKRIPSI



**Oleh :
Rapina Malemta Sembiring
151010042**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2019**

**PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI
KECAMATAN BATU AJI OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh :
Rapina Malemta Sembiring
151010042**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTRA BATAM
TAHUN 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 16 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp 6.000,00

Rapina Malemta Sembiring

151010042

**PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG DI
KECAMATAN BATU AJI OLEH DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA
BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar sarjana**

**Oleh
Rapina Malemta Sembiring
151010042
BABI**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 16 Februari 2019

DR. Razaki Persada, S.E., M.Si.

Pembimbing

ABSTRAK

Gas merupakan salah satu faktor pendukung dalam berbagai kegiatan industri maupun rumah tangga, pada saat ini gas LPG sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat bahkan gas LPG tidak lagi disebut sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Saat ini gas LPG ukuran 3 kg merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat salah satu alasannya karena harganya disubsidi oleh pemerintah yang tujuannya untuk membantu masyarakat kurang mampu/miskin namun pada kenyataannya di Kota Batam khususnya di Kecamatan Batu Aji dalam pendistribusiannya banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu oleh karena itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam adalah sebagai salah satu dinas yang melakukan pengawasan terhadap gas LPG ukuran 3 kg, pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg agar sampai kepada masyarakat secara tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Batam dalam pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg. Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif kualitatif sesuai dengan data dan fakta dilapangan. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata, hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan pihak sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg terhadap standar operasioanl prosedur (SOP) yang dijadikan sebagai acuan standar ukuran dalam melaksanakan pengawasan karena regulasi dalam distribusi LPG 3 kg ini masih rancu dan pemberian sanksi untuk pengecer jalanan yang menjual melebihi harga eceran tertinggi belum diterapkan karena tidak ada dasar hukum yang jelas.

Kata kunci: Pengawasan, Pendistribusian, Masyarakat dan Agen LPG 3 kg

ABSTRACT

Gas is one of the supporting factors in a variety of industrial and household activities, at this time LPG gas is no stranger in the midst of society even LPG gas is no longer referred to as a luxury item, but has become a staple household need today. Currently 3 kg LPG gas is the most sought after item by the community, one of the reasons is because the price is subsidized by the government, which aims to help the poor but in reality in the city of Batu Aji the distribution is widely used by the people who able, therefore, the Office of Industry and Trade of Batam City is one of the agencies that supervise LPG gas measuring 3 kg, the supervision in question is the supervision of the distribution of 3 kg LPG gas to reach the community on target. This study aims to determine the role of the Batam Industry and Trade Office in monitoring the distribution of 3 kg LPG gas. The data analysis technique used is a qualitative descriptive technique in accordance with the data and facts in the field. The data collected is in the form of words, interviews, pictures, notes in the field, photos, personal documents. The results showed that there were still many violations committed by the sub-distributor or 3 kg LPG base on the standard operating procedure (SOP) which was used as a standard reference in carrying out supervision because the regulation in the distribution of 3 kg LPG was ambiguous and sanctioned for street retailers those who sell beyond the highest retail price have not been applied because there is no clear legal basis.

Keywords: Supervision, Distribution, Society and Agent LPG Three Kilogram

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Bobby Mandala Putera, S.IP., M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara.
4. Bapak Dr. Razaki Persada, S.E., M.Si. selaku pembimbing yang sabar dan bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, motivasi serta dukungan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah bersedia menjadi penguji dan memberikan saran dan kritik yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan mengajarkan ketekunan selama menyelesaikan studi di Universitas Putera Batam.

7. Bapak/Ibu seluruh Dosen Pengajar Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman dan motivasinya.
8. Bapak Andri Nurahman, selaku Kepala Seksi ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis dalam segala hal selama melakukan penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
9. Kedua orang tua yang penulis banggakan Perdamenta Sembiring (+) dan Lasma Br Angkat (+) yang menjadi motivasi penulis selama menyelesaikan studi serta kedua kakakku Reni Sembiring dan suami Prasetyo Bayu Kurniawan dan Rasmita Sembiring yang sangat penulis cintai yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta selalu mendoakan agar tidak mudah putus asa dan terus semangat dalam meraih cita-cita dan tidak lupa juga untuk keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan doa bagi penulis.
10. Teman-teman di Universitas Putera Batam Program Studi Administrasi Negara angkatan 2015, khususnya teruntuk Aprillia, Khoirunisyah, Hafizhotun Ni'mah, Arisna, Yenni Okyanti, Nurdiana, dan Yessika Simanullang serta Pricilia Anggini yang selalu menghibur, memberikan semangat yang luar biasa dan membantu ketika penulis mengalami kesulitan selama penyusunan skripsi.
11. Seluruh staf perpustakaan Universitas Putera Batam yang telah membantu menyediakan segala referensi buku selama penyusunan skripsi.
12. Serta seluruh pihak yang memberikan masukan, kritik dan saran serta bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdoa

semoga Tuhan memberkati setiap perjalanan yang kita tempuh kedepannya dan bisa bertemu kembali di lain waktu dengan keadaan sehat dan sukses. Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan pada penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapaka kritik dan saran yang membangun demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terkhusus bagi pembaca semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi untuk penyusunan skripsi berikutnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Batam, 16 Februari 2019

Rapina Malemta Sembiring

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan.....	11
2.1.1 Pengertian Pengawasan.....	11
2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan	14
2.1.3 Mekanisme Pengawasan/Pengaduan.....	15
2.1.4 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan.....	16
2.1.5 Tahap Pengawasan	19
2.1.6 Asas-Asas Dalam Pengawasan.....	21
2.1.7 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan Yang Efektif	25
2.1.8 Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan	27
2.1.9 Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan	29
2.2 Saluran Distribusi	30
2.2.1 Pengertian Saluran Distribusi	30
2.2.2 Saluran Distribusi Pardigma Lama.....	31
2.2.3 Saluran Distribusi Kebijakan Publik	34
2.2.4 Fungsi Saluran Distribusi.....	38
2.2.5 Menentukan Struktur Distribusi	39
2.3 Penelitian Terdahulu.....	42
2.4 Kerangka Pemikiran.....	47

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Fokus Penelitian.....	48
3.3 Sumber Data	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	50

3.5	Metode Analisis Data	51
3.6	Keabsahan Data	53
3.7	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam	57
4.1.1	Visi dan Misi	57
4.1.2	Struktur Organisasi.....	60
4.1.3	Tugas dan Fungsi	61
4.1.4	Sumber Daya Manusia.....	62
4.2	Hasil Peneltian	63
4.2.1	Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kecamatan Batu Aji Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam.....	63
4.2.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kecamatan Batu Aji Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam	70
4.3	Pembahasan	74
4.3.1	Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kecamatan Batu Aji Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam.....	74
4.3.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 kg Di Kecamatan Batu Aji Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam.....	79

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	82
5.2	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	85
----------------------------	-----------

LAMPIRAN I PEDOMAN WAWANCARA

LAMPIRAN II DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN III SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN IV DOKUMENTASI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Peta Sebaran LPG PSO Di Kota Batam Tahun 2018.....	4
Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara	51
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	56

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tahap-Tahap Dalam Proses Pengawasan	30
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 3.1 Alur Analisis Data.....	53
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	60
Gambar 4.2 Data Pegawai Berdasarkan Golongan.....	62
Gambar 4.3 Persentase Komposisi Pegawai	63

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di tengah-tengah semakin kompleks tantangan bangsa Indonesia menghadapi era global saat ini, mengedepankan pembaharuan, pemikiran-pemikiran yang inovatif dan produktif pada lembaga pemerintah baik pusat dan daerah merupakan langkah dan sikap yang tepat serta patut mendapatkan dukungan dari semua komponen masyarakat. Dewasa ini masalah perekonomian sering dihubungkan dengan usaha prosedur maupun sistem dari pengawasan publik. Dalam perekonomian di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai pengawas sekaligus pembuat kebijakan dan melakukan intervensi jika diperlukan tetapi tetap mengakui keberadaan pihak swasta. Menurut pakar yaitu, Saiful Anwar (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan.

Tahun 2007 pemerintah membuat kebijakan untuk mengkonversi minyak tanah ke gas LPG dengan tujuan mempermudah kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga, agar semua kalangan masyarakat dapat menggunakannya tahun 2009 pemerintah kembali membuat kebijakan dengan menghadirkan varian ukuran gas 3 kg atau biasa disebut LPG (*Liquid Petroleum Gas*) yang disubsidi dengan pengguna LPG ukuran 3 kg terdiri dari rumah tangga yang terverifikasi

tidak mampu/miskin dan usaha mikro. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat dan strategis untuk menyalurkan gas bersubsidi yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Penyalur atau agen LPG 3 kg merupakan koperasi, usaha kecil, atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk sebagai agen oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam untuk melakukan kegiatan penyaluran. Sedangkan sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg merupakan badan usaha atau perorangan yang bertindak atas izin yang telah dikeluarkan oleh PT. Pertamina dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam yang melaksanakan kegiatan penyaluran LPG 3 kg kepada konsumen. Dalam pengawasan terhadap pendistribusian LPG 3 kg ke masyarakat ini melibatkan instansi terkait antara lain Pemerintah Daerah, Lembaga Independen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Migas, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengangkutan, pengelolaan dan perniagaan dilakukan oleh badan yang memiliki izin dari pemerintah melalui dinas terkait. Sehubungan dengan maksud tersebut maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tentang penyediaan pendistribusian dan penetapan harga gas LPG. Mewujudkan Peraturan Presiden tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG bersubsidi bagi masyarakat miskin.

LPG (Liquid Petroleum Gas) sudah tidak asing lagi di tengah-tengah masyarakat bahkan gas LPG tidak lagi disebut sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini oleh sebab itu gas LPG 3 kg merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga dan usaha mikro, gas LPG 3 kg sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan barang lainnya salah satu alasannya karena harganya disubsidi oleh pemerintah yang tentu lebih murah dibandingkan dengan gas LPG yang ukuran 12 dan 5.5 kg.

Gas LPG 3 kg yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin, pada kenyataannya di Kota Batam khususnya Kecamatan Batu Aji dalam pendistribusiannya banyak sekali dimanfaatkan oleh masyarakat yang mampu, hal ini menunjukkan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat yang semestinya bisa dinikmati oleh lebih banyak kalangan masyarakat golongan ekonomi rendah.

Seperti yang kita ketahui LPG 3 kg merupakan barang kebutuhan pokok yang pendistribusiannya diatur oleh Pertamina sehingga tidak semua outlet/warung bisa menjualnya sedangkan gas LPG 3 kg ini hampir semua kalangan menggunakannya walaupun memang tidak seharusnya seluruh kalangan masyarakat dapat menggunakannya akan tetapi faktanya di lapangan berbanding terbalik mengakibatkan sering terjadi kekurangan gas LPG 3 kg, karena stoknya terbatas tidak semua konsumen kebagian. Dari kelangkaan tersebut, di sinilah terjadi banyak kecurangan harga penjualan dari agen LPG 3 kg dengan menjual melebihi dari harga eceran tertinggi) yang sudah ditentukan.

Tabel 1.1 Peta Sebaran LPG PSO Di Kota Batam Tahun 2018

No	Wilayah		Jumlah Pangkalan	Realisasi LPG PSO 2018 *)	Nama Agen	Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan				
1	Batu Aji	Bukit Tempayan	24	126,364	PT. Makmur Kasih Karunia	-
		Buliang	65	469,539	PT. Makmur Kasih Karunia	-
		Tanjung Uncang	63	405,371	PT. Makmur Kasih Karunia	-
		Kibing	44	267,541	PT. Mitra Chandi Abadi	-
			196	1,268,815	Tabung/ Tahun	

(Sumber: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam Tahun 2018)

Banyaknya gas LPG 3 kg yang di distribusikan tidak membuat masyarakat dapat menikmatinya terutama masyarakat golongan ekonomi rendah, karena tidak dapat dipungkiri bahwa menggunakan gas LPG 3 kg sangat membantu ekonomi rumah tangga. Seperti yang terlihat dalam tabel di atas peta sebaran LPG pada tahun 2018 gas LPG 3 kg yang di didistribusikan di Kecamatan Batu Aji Kota Batam sesuai dengan jumlah KK dan usaha mikro yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan tetapi dengan jumlah tersebut masih saja terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg dikarenakan penggunaanya melebihi jumlah yang telah terdaftar sebagai masyarakat yang terverifikasi miskin dan usaha mikro.

Oleh sebab itu agar pendistribusian LPG 3 kg merata untuk masyarakat miskin dan usaha mikro serta untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan

lainnya maka perlu adanya pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Meskipun telah ada peraturan mengenai penetapan harga jual eceran tertinggi sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas Dan Liquefied Petroleum Gas dan yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, pada kenyataannya di lapangan masih banyak ditemukan penyelewengan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih bagi sub agen (pangkalan). Seperti yang di kutip dalam salah satu media cetak batampos.co.id “sepekan terakhir, warga Sagulung, dan Batu Aji, mulai kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kilogram . Hal ini mengakibatkan banyak warga yang terpaksa harus mondar-mandir untuk mencari keberadaan gas melon tersebut, parahnya lagi, meskipun sudah langka, harga gas elpiji 3 kilogram ini dijual mencapai Rp 20.000 hingga Rp 24.000/tabung. (“Batam Pos, 2016).

Pengawasan distribusi LPG 3 kg penting dilakukan untuk menjamin kelancaran dan keterjangkauan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan LPG 3 kg bagi masyarakat, maka perlu adanya pengawasan dan pemantauan distribusi LPG 3 kg dari penyimpangan distribusi, pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), kelangkaan dan penyalahgunaan LPG 3 kg. Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir (Mukarom & Laksana, 2016:191) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah menghasilkan aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan

berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektif, sehat, dan bertanggung jawab. Dalam hal ini pengawasan bermaksud pengawasan pendistribusian LPG 3 kg agar tepat sasaran, efektif dan efisien, mengingat jumlah kebutuhan LPG 3 kg yang semakin meningkat.

Tidak dapat dipungkiri pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi ini merupakan hal yang sangat membantu bagi masyarakat, terutama masyarakat yang keadaan ekonomi menengah ke bawah. Karena dalam kehidupan sehari-hari menggunakan LPG ukuran 3 kg ini lebih ekonomis dan lebih hemat, sehingga rumah tangga dan industri kecil bisa menjangkau pengeluaran keuangan usaha dan rumah tangga. Sebagaimana kita ketahui penduduk kota Batam sendiri tiap tahunnya bertambah secara otomatis kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari bertambah, salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dan yang paling dicari di kalangan masyarakat adalah gas LPG 3 kg agar bisa memenuhi kebutuhan pangan. Sedangkan masih banyak terjadi masalah dalam pendistribusian gas LPG 3 kg ini dari banyak hal salah satunya yaitu di jelaskan dalam media cetak “ masyarakat Batam sangat resah dengan pelayanan pihak Pertamina akhir akhir ini, disinyalir tabung gas 3 kg tidak sesuai dengan ukuran volume standar, warga merasa dalam penggunaan satu tabung gas biasanya 2 minggu sampai 3 minggu, tergantung cara pemakaian, tetapi akhir-akhir ini paling lama 10 hari kadang tidak sampai (Samjonews, 2017), sedangkan masyarakat Batam sendiri mayoritas memiliki pekerjaan sebagai buruh PT dan galangan kapal yang secara otomatis itu akan memberatkan sebagian masyarakat untuk membeli

tabung gas per minggunya. Berawal dari kurang adanya transparansi tentang berapa jumlah kuota gas LPG 3 kg yang dialokasikan Pertamina kepada agen, dan begitu juga dari pihak agen kepada pangkalan, sehingga ruang pengoplosan gas bersubsidi tersebut terbuka lebar. Jadi dapat disimpulkan bahwa masih banyak penyelewengan mengenai pendistribusian gas LPG 3 kg ini tidak hanya masalah kelangkaan, pengoplosan LPG 3 kg ini juga masih kerap terjadi di kalangan masyarakat akibatnya gas yang disubsidi oleh pemerintah tersebut menjadi tidak membantu masyarakat tetapi malah memberatkan dan membahayakan masyarakat karena banyak juga terjadi akibat pengoplosan gas yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Pada awal tahun 2018 Pemerintah beserta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat keputusan untuk mealakukan pendistribusian tertutup terhadap gas LPG 3 kg hal ini merupakan salah satu solusi dari pemerintah untuk menekan angka subsidi, hal ini di jelaskan dalam artikel media cetak “VIVA.co.id, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan distribusi tertutup LPG 3 kilogram bersubsidi akan berlaku secara penuh di seluruh Indonesia pada tahun 2018. Saat ini, pemerintah fokus membenahi infrastruktur pendistribusian mulai dari mesin EDC hingga pembagian kartu khusus bagi penerima subsidi LPG 3 kg (Viva, 2018). Namun sepertinya hal tersebut belum berjalan secara maksimal di seluruh Indonesia khususnya Batam, karena menurut penuturan Bapak Andri Nurahman selaku Kepala Seksi ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam sistem pendistribusian tertutup belum diterapkan di wilayah Batam.

Karena itu tidak hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja yang melakukan pengawasan, perlu juga adanya dukungan dari Pemerintah dan semua pihak khususnya masyarakat selaku pengguna gas LPG 3 kg agar selalu memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian dalam Pasumah, Lopian, & Liando, (2018) ditemui hal serupa yaitu lemahnya pengawasan oleh dinas perindustrian dan perdagangan mengenai pemeriksaan izin perindistribusian minyak solar industri PT. Stemar Jaya. Selain itu kurangnya pelaksanaan pemeriksaan untuk ketersediaan pasokan minyak solar industri, hal ini diakibatkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara kedua belah pihak, dikarenakan tenaga pemeriksaan dinas perindustrian dan perdagangan kota Bitung, belum menetapkan bidang penyimpangan yang sering terjadi selain itu kurangnya sarana dan prasana yang dimiliki oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Bitung dalam mendukung proses pelaksanaan pengawasan yang ada.

Oleh karena itu berdasarkan fenomena di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Di Kecamatan Batu Aji Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam.**

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Batam

1.4 Manfaat Penelitian

1. Keilmuan Administrasi Publik
 - a. Memberikan kontribusi pada pengelola gas LPG 3 kg guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada, khususnya mengenai pendistribusian gas LPG 3 kg
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam bidang pengawasan, khususnya pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg
 - c. Menjadi referensi bagi mahasiswa sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara lebih komprehensif.
2. Bagi Disperindag Kota Batam
 - a. Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan mengenai pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang terkait.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa saran serta evaluasi sebagai bahan pertimbangan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan terkait dengan usaha pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan informasi dan gambaran tentang pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg dan diharapkan mampu menambah wawasan bagi yang membutuhkan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengawasan

2.1.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan berasal dari akar kata “awas”, mendapat awal “an” dan akhiran “an” artinya adalah penilikan dan penjagaan (Murhaini, 2014:1). Sementara itu pakar lain, yaitu Saiful Anwar dalam (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman bahwa pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan. Dengan demikian sifatnya represif yaitu menghindari terjadinya penyimpangan.

Menurut Prayudi Atmosudirjon (Murhaini, 2014:3), pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan. Di dalam pemahaman ini terkandung makna sinkronisasi. Antara apa yang telah direncanakan, kemudian dilaksanakan dan akhirnya diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan antara rencana dan pelaksanaannya. Pakar manajemen M. Manullang dalam (Murhaini, 2014:3) memberikan pemahaman tentang pengawasan dimaksud. Bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Di dalam kaitan ini juga terkandung upaya untuk tetap konsistensi di antara perencanaan dan pelaksanaan. Untuk menjaga konsistensi inilah relevansinya pengawasan dilakukan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Pengawasan adalah proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan memegang peranan penting karena tanpa pengawasan yang baik, tujuan yang dicapai akan memuaskan. Dalam proses pengawasan juga diperlukan tahap-tahap pengawasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang meliputi tahap penetapan standar, tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan, tahap pembandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan koreksi (Mukarom & Laksana, 2015:155).

Untuk menjalankan proses pengawasan tersebut, dibutuhkan alat bantu manajerial sehingga jika terjadi kesalahan dalam suatu proses dapat langsung diperbaiki. Selain itu, pada alat-alat bantu pengawasan ini dapat menunjang terwujudnya proses pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan. Pengawasan meliputi bidang-bidang pengawasan yang menunjang keberhasilan dari suatu tujuan organisasi, tidak terkecuali pengawasan dalam bidang pelayanan publik

Pengawasan didefinisikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin dalam mencapai tujuan. Georgy R. Tery dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi semua kegiatan yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu,

menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Robbin menyatakan bahwa pengawasan merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi (Mukarom & Laksana, 2015). Menurut Dale dalam (Mukarom, 2015:156) menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan, defenisi lain yang berpendapat tentang pengawasan yaitu Siagian dalam (Mukarom, 2015:156) menyebutkan bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi sepertinya halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan perusahaan karena penjualan dapat didorong karena kualitas barang lebih unggul dari saingan, atau harganya bersaing, dan lain-lain. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat

sekehendak hati. Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah dikatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Kesimpulannya, pengawasan merupakan suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.

2.1.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dari pemerintahan yang telah direncanakan, diperlukan pengawasan karena dengan pengawasan tersebut, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Dengan demikian, pengawasan sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk (Mukarom & Laksana, 2015):

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.

Berkaitan dengan tujuan pengawasan, Situmorang dan Juhir dalam (Mukarom & Laksana, 2015) mengemukakan bahwa tujuan pengawasan adalah terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (*control social*) yang objektik, sehat, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah membandingkan antara pelaksanaan dan rencana serta instruksi yang telah dibuat, untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan atau kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja dan untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan, dan kegagalan atau dengan kata lain disebut tindakan korektif

2.1.3 Mekanisme Pengawasan/Pengaduan

Mekanisme pemngawasan dari masyarakat dari masyarakat yang diatur diatas adalah melalui pengaduan. Adapun pnegaduan dilakukan oleh masyarakat apabila penyelenggaraan pelayanan publik (Mukarom & Laksana, 2015):

1. Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan; dan
2. Pelaksana yang memberi pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan

Dalam konteks pengawasan di daerah, pengaduan tersebut ditujukan kepada penyelenggara, ombudsman, dan/ atau Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota (Pasal 40 UU No 25 tahun 2009). Pengaduan seperti maksud diatas diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya. Pengaduan tersebut dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengaduan menerima pelayanan. Dalam pengaduannya, pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi. Dalam keadaan tertentu, nama dan identitas pengadu dapat dirahasiakan.

2.1.4 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai hal berikut (Mukarom & Laksana, 2015:158):

a. **Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung**

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawasan dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Adapun pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan tanpa pengawasan.

b. **Pengawasan Preventif dan Represif**

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, apabila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif berkaitan dengan pengesahan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah tertentu. Selama pengesahan belum diperoleh Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan belum berlaku dan pengawasan ini dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Adapun pengawasan represif berbentuk pengujian berlaku atau pembatalan. Suatu Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang sudah berlaku dan mempunyai kekuatan memingkat dapat ditangguhkan atau dibatalkan karena bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya dan pengawasan ini dilakukan melalui post audit dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat, meminta laporan pelaksanaan, dan sebagainya.

c. Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang bersangkutan. Adapun pengawasan eksternal adalah pengawasan dilakukan oleh aparat dari luar pemerintah. Seperti pengawasan bidang keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sepanjang meliputi seluruh seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi

pemerintah lain. Macam-macam pengawasan ini didasarkan pada pengklasifikasian pengawasan. Di samping itu, ada pula beberapa macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya (Mukarom & Laksana, 2015:160), yaitu:

- a. Pengawasan anggaran pendapat (*budgetary control*)
- b. Pengawasan biaya (*cost control*)
- c. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
- d. Pengawasan produksi (*production control*)
- e. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)

Pelaksanaan pengawasan, menurut Schermerhon (2001) dalam (Mukarom & Laksana, 2015:160) dapat dibagi dalam empat jenis, yaitu:

- a. Pengawasan feedforward (pengawasan umpan di depan)
Pengawasan sebelum aktivitas dilakukan atau dimulai yang bertujuan untuk menjamin kejelasan sasaran, tersedianya arahan yang memadai, ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dan memfokuskan pada kualitas sumber daya.
- b. Pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan) Pengawasan ini memfokuskan pada apa yang terjadi selama proses berjalan yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk menjamin segala sesuatu dengan rencana dan mengurangi hasil yang tidak diinginkan
- c. Pengawasan Feedback (pengawasan umpan balik)

Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilaksanakan . Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang berguna untuk meningkatkan kinerja pada masa depan dan memfokuskan kualitas hasil.

d. Pengawasan Internal-eksternal

Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan eksternal melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.

2.1.5 Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Donnelly et. al. dalam (Mukarom & Laksana, 2016:193) mengelompokkan pengawasan menjadi tiga tipe pengawasan yaitu sebagai berikut:

a. *Preliminary Control*

Preliminary control merupakan pengawasan pendahuluan. Salah satu peran pengawasan adalah meneliti setiap usulan anggaran, khususnya dari penyedia layanan publik, dari sisi harga layanan, output, maupun outcomes dari setiap jenis layanan. Pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan sebab segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pemerintah, unit layanan teknis pelayanan publik bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara memadai atau tidak.

b. *Interim Control*

Interim control merupakan pengawasan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan pun dapat diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau masa berjalannya sebuah peraturan.

c. *Post Control*

Selain memastikan layanan publik berjalan sesuai dengan harapan post control juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki, atau meningkatkan kualitas layanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Maman ukas (2004) dalam ((Mukarom & Laksana, 2016:194) menyatakan tiga unsur pokok atau tahapan dalam proses pengawasan, yaitu sebagai berikut.

1. Ukuran yang menyajikan bentuk-bentuk yang diminta. Standar ukuran ini bisa nyata, mungkin juga tidak nyata, umum ataupun khusus, tetapi selama seseorang masih menaggap bahwa hasilnya adalah seperti yang diharapkan.
2. Perbandingan antara hasil yang nyata dengan ukuran tersebut. Evaluasi ini harus dilaporkan kepada khalayak ramai yang dapat berbuat sesuatu akan hal ini.
3. Kegiatan mengadakan koreksi. Pengukuran laporan dalam suatu pengawasan tidak akan berarti tanpa adanya koreksi jika dalam hal ini diketahui bahwa aktivitas umum tidak mengarah ke hasil-hasil yang diinginkan.

Menurut Kadarman (2001) dalam (Mukarom & Laksana, 2016:195), langkah-langkah proses pengawasan, yaitu:

1. Menetapkan standar. Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, secara logis hal ini berarti bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan yang dimaksud adalah menentukan standar.
2. Mengukur kinerja. Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.
3. Memperbaiki penyimpangan. Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

2.1.6 Asas-Asas Dalam Pengawasan

Sebagaimana disampaikan oleh Prayudi, dalam (Murhaini, 2014:5) mencapai pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari pengawasan. Termasuk di dalamnya pengendalian atas sektor dari aktivitas yang diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus ditaati secara konsisten manakala pengawasan di jalankan dalam proses pelaksanaan aktivitas. Asas ini saya jadikan sebagai indikator dalam pengawasan. Adapun asas yang dimaksud adalah sebagai berikut (Murhaini, 2014:5):

- a. Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk

menghindari penyimpangan atau deviasi perencanaan. Tentu saja ketika perencanaan tersebut dilaksanakan.

- b. Asas efisiensi. Dimaksud dengan asas ini adalah bahwa agar sedapat dan sejauh mungkin pelaksanaan atas aktivitas dihindarkan dari deviasi. Deviasi pasti muncul dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan masalah ikutan yang tidak perlu, khususnya yang berasal dari luar dan datangnya tanpa diduga.
- c. Asas tanggung jawab. Maksud dari asas ini adalah agar dapat dilaksanakannya perencanaan dengan baik, para pelaksana harus benar-benar memiliki tanggung jawab. Tidak semata di dasarkan pada adanya pengawasan yang membawa konsekuensi sanksi. Lebih dari itu adalah tanggung jawab internal terhadap proses pelaksanaannya .
- d. Asas pengawasan.
Maksud asas ini adalah ditujukan terhadap masa depan atas aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari atas ini tidak lain adalah untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadi penyimpangan perencanaan yang akan terjadi. Baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
- e. Asas langsung
Maksudnya bahwa di dalam melaksanakan pengawasan itu senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksanapun mempunyai beban langsung untuk di samping melaksanakan juga melakukan pengawasan
- f. Asas refleksi perencanaan

Maksud dari asas ini bahwa di dalam melaksanakan aktivitas terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas pengawasannya.

g. Asas penyesuaian dengan organisasi

Maksudnya bahwa keseluruhan aktivitas mengandung satu sistem yang teratur dan terkendali, tidak saja dalam pelaksanaan aktivitas, di dalam pengawasan pun harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. masing-masing bagian punya kewenangan yang saling terkait dan terkoordinasi.

h. Asas individual

Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan pengawasan. Masing-masing individu harus merasakan hal tersebut yang terefleksikan dalam kinerjanya.

i. Asas standar

Maksudnya bahwa di dalam pengawasan mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ukuran untuk itu dirumuskan berdasarkan standar yang jelas dan akurat. Akurasi dibutuhkan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai atas dasar pelaksanaan aktivitas dimaksud sehingga benar-benar terarah secara standar. Artinya dapat dicapai berdasarkan rasionalitas yang standar.

j. Asas pengawasan terhadap strategi

Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas akan muncul berbagai kemungkinan. Atas dasar kemungkinan yang muncul harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara detail faktor strategi dimaksud.

k. Asas pengecualian

Terkandung maksud bahwa akan muncul faktor pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian perhatian yang terukur. Perhatian dimaksud itu ditujukan terhadap faktor pengecualian yang muncul dalam pelaksanaan aktivitas serta pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud menghadapi perubahan kondisi dan situasi.

l. Asas pengendalian fleksibel

Maksudnya bahwa pengawasan harus senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibilitas dibutuhkan untuk menghindari kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan pengawasan.

m. Asas peninjauan kembali

Maksudnya di dalam pelaksanaan bahwa pengawasan harus selalu ditinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi jaminan tercapainya tujuan.

n. Asas tindakan

Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak saja menjadi bagian dari pencapaian tujuan, namun juga untuk melakukan koreksi terhadap terjadinya penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya.

Pada dasarnya pengawasan itu bersifat menyeluruh dan dimensi yang luas. Untuk pelaksanaannya memerlukan konsistensi atas penerapan prinsip pengawasan itu sendiri. Prinsip yang secara konsisten harus dijalankan pada pelaksanaan, yang secara normatif tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya penyimpangan. Penyimpangan sekecil apapun yang terjadi dan ditoleransi secara sadar akan menjadi penghambat. Menghambat pelaksana dari perencanaan yang telah digariskan

Dengan demikian disamping itikad untuk menerapkan pengawasan secara konsisten harus disertai dengan kesungguhan untuk menerapkannya. Hal ini berarti bahwa pengawasan mesti dilaksanakan secara objektif. Objektivitas menjadi kata kunci untuk keberhasilan pengawasan itu sendiri yang niscaya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program yang telah dibuat.

2.1.7 Karakteristik-Karakteristik Pengawasan Yang Efektif

Untuk menjadi efektif menurut (Handoko, 2016:371) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen* mengenai karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya 1) mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar,

2) tepat waktu, 3) dengan biaya yang efektif, 4) tepat-akurat, 5) dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Karakteristik-karakteristik pengawasan yang efektif dapat lebih diperinci sebagai berikut.

1. Akurat. informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat obyektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau palingan tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari

8. proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan organisasi dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukannya.
9. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan.
10. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang seharusnya diambil.
11. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggungjawab dan berprestasi.

Selain sepuluh karakteristik pengawasan efektif diatas, perlu diperhatikan bahwa standar yang ditetapkan harus diterima oleh para anggota organisasi sebagai bagian integral dan adil dari pekerjaan mereka. Demikian pula bahwa sistem pengawasan harus konsisten dengan kultur sistem organisasi yang bersangkutan.

2.1.8 Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperhatikan oleh organisasi. Faktor-faktor itu antara lain sebagai berikut (Handoko, 2016:364):

- a. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan organisasi terjadi secara terus menerus dan tidak dapat dihindari seperti munculnya inovasi mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa

- b. organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- c. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian yang tersebar luas. Semuanya memerlukan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
- d. Kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan-kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.
- e. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan

f. apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

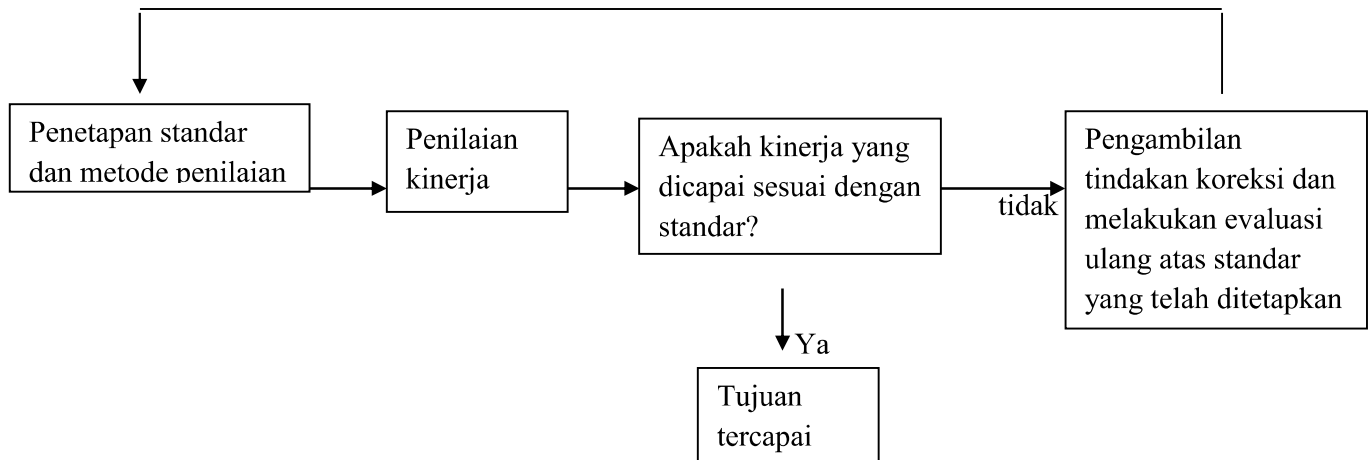
Kata “pengawasan” sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreatifitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaiknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

2.1.9 Langkah-Langkah Dalam Proses Pengawasan

Langkah-langkah ini sebagaimana diterangkan dalam Gambar 2.1 adalah terdiri dari:

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja
2. Penilaian kinerja
3. Membandingkan kinerja dengan standar
4. Pengambilan tindakan koreksi

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori pengawasan yang dikemukakan oleh (Sule & Saefullah, 2014:321) dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Manajemen* mengenai langkah-langkah dalam proses pengawasan yang efektif sebagai indikator dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Tahap-tahap dalam proses pengawasan
(Sumber: Diadaptasi dari Stoner, Freeman, dan Gilbert (2000) dalam (Sule & Saefullah, 2014:321)).

2.2 Saluran Distribusi

2.2.1 Pengertian Saluran Distribusi

Dalam kegiatan manufaktur, distribusi memegang peranan penting dalam menjamin produk yang dipasarkan supaya produk tersebut tersedia secara merata di setiap wilayah. Dapat dibayangkan apabila suatu produk yang dihasilkan tidak terdistribusi secara merata yang akan membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam mendapatkan produk itu. Kebanyakan, perusahaan manufaktur yang sedang mengalami pertumbuhan memanfaatkan agen distributor untuk pendistribusian produk mereka. Cara ini lebih efektif dan efisien dan dapat mengurangi biaya distribusi yang tinggi jika mendirikan cabang sendiri (Suryanto, 2016:2).

Ada beberapa faktor yang membatasi penyaluran secara langsung dari produsen ke konsumen, yakni sebagai berikut (Suryanto, 2016:3):

1. *Geographical Gap*, perbedaan jarak geografis yang disebabkan oleh perbedaan tempat produksi dengan lokasi konsumen yang tersebar luas.

2. *Time Gap*, perbedaan jarak waktu yang disebabkan perbedaan waktu produksi dengan kebutuhan konsumsi dalam jumlah besar dan menimbulkan nilai guna waktu
3. *Quality Gap*, perbedaan dalam jumlah produksi yang lebih besar akan lebih efisien biaya per unitnya dibandingkan produksi lebih kecil.
4. *Communication dan Information Gap*, perbedaan informasi dan komunikasi yang berbeda di mana produsen tidak mengetahui produk yang dibutuhkan dan siapa konsumen potensialnya. Hal ini menimbulkan nilai guna milik.

2.2.2 Saluran Distribusi Paradigma Lama

Peran Utama dari fungsi distribusi adalah untuk memastikan bahwa produk yang tepat tersedia pada waktu yang tepat. ini menunjukkan pengelolaan saluran distribusi mulai dari sumber pasokan awal hingga terakhir ke konsumen. Ada berbagai tipe dalam pemasaran dan pendistribusian suatu barang (Suryanto, 2017:6).

1. Saluran Outlet Tradisional

Outlet tradisional adalah outlet yang memiliki sistem operasional yang cukup sederhana atau manual. Saluran tradisional di antaranya yaitu warung, rombongan/gerobak, dan pasar desa/pasar becek

a. Warung

Warung adalah outlet yang kegiatan utamanya menjual suatu produk dalam bentuk eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan dan membeli untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijual sangat terbatas. Oleh

sebab itu, banyak perusahaan yang sengaja memberdayakan outlet ini dengan cara melayani secara langsung dan harus dengan cara tunai.

b. Rombongan atau Gerobak.

Rombongan atau gerobak adalah outlet yang kegiatan utamanya menjual dalam bentuk eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan dan hanya membeli untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijual sangat terbatas. Outlet ini ada dimana-mana, baik ditempat yang permanen maupun permanen.

c. Pasar Tradisional

Pasar tradisional dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda. Jumlah pasar tradisional mengalami penurunan dari 181 pasar (2005) menjadi 13.450 pasar (2007), padahal pasar tradisional mempunyai kaitan erat dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

d. Retailer

Retailer adalah outlet yang utamanya menjual secara eceran. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai golongan yang hanya membeli eceran untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijual terbatas pada produk yang terjangkau oleh konsumen. Persediaanpun terbatas. Kelebihan outlet retailer adalah jumlahnya sangat banyak dibandingkan outlet lainnya. Outlet pengecer ini sangat dalam menjual dan mempromosikan suatu produk ke konsumen secara langsung.

e. Semigrosir

Outlet ini merupakan outlet yang penjualannya secara partai maupun eceran. Kosumen yang dilayani dari berbagai golongan, baik yang membeli yang secara eceran maupun partai untuk dijual lagi. Produk yang dijualnya tidak terbatas, tetapi harus produk yang laku di pasaran. Harga yang dijual juga beragam, tidak hanya untuk golongan menengah ke atas, tetapi juga menyediakan produk untuk kalangan menengah ke bawah. Kelebihan outlet semigrosir adalah mampu membeli produk dalam jumlah melebihi toko eceran. Stok produk dan jumlah item juga banyak .

f. Grosir

Grosir adalah toko yang melayani pembelian di tingkat kulakan. Jumlah outlet lebih sedikit di bandingkan toko semigrosir. Produk yang di jual juga terbatas pada produk yang fast moving. Pangsa pasar toko grosir mencakup toko semigrosir, retail, dan masyarakat yang membeli secara partai

g. Minimarket

Operasional minimarket sama dengan outlet pengecer. Konsumen yang dilayani berasal dari berbagai kalangan dan untuk dikonsumsi sendiri. Produk yang dijualnya tidak terbatas pada produk tertentu , tetapi meliputi berbagai jenis produk.

h. Supermarket

Supermarket adalah outlet yang kegiatan operasionalnya hamper sama dengan minimarket yang menjual secara eceran dan partai. Produk yang dijual adalah item yang beraneka ragam sehingga konsumen dapat

memenuhi semua kebutuhannya. Konsumen yang dilayani ialah semua lapisan golongan masyarakat .

i. Hipermarket

Hipermarket merupakan outlet yang kegiatan operasionalnya sama dengan supermarket , yakni menjual produk secara eceran dan partai. Produk yang dijual beraneka ragam , melebihi persediaan stok supermarket.

2. Saluran Outlet Modern

Outlet modern memiliki sistem operasional yang cukup baik dan sistematis dari penerimaan barang, penyimpanan barang, dan pembayaran. Untuk mengatasi permasalahan di toko tradisional , outlet modern harus berubah menjadi semi-self service atau sekaligus swalayan total. Mereka harus menerims minimarket, misalnya dalam hal penempatan barang, *brand blocking* dan *eye level* agar muncul *impulse purchase*.

2.2.3 Saluran Distribusi Kebijakan Publik

1. Makna dan Fungsi Saluran Distribusi

Pada perekonomian saat ini kewajiban saluran distribusi merupakan salah satu kegiatan yang cukup penting dalam menyalurkan produk ke tangan konsumen. Kesalahan dalam menentukan saluran distribusi akan menghambat dan berpengaruh kurang baik terhadap dan berpengaruh kurang baik terhadap usaha penyebaran produk perusahaan. Saluran distribusi adalah sekumpulan organisasi yang saling bergantung, yang terlibat dalam proses yang membuat produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. Ketentuan perusahaan

dalam memilih saluran distribusi akan menjadikan operasi perusahaan menjadi lebih efisien dalam memperluas pasar, untuk mencapai konsumen yang dituju . Adapun fungsi saluran distribusi, yaitu informasi , promosi, kontak, penyesuaian, dan negosiasi (Anggara, 2014:123).

2. Faktor-faktor yang Memengaruhi Saluran Distribusi (Anggara, 2014:124)

a. Perilaku dan Organisasi Saluran

Saluran distribusi terdiri atas perusahaan yang mengikat dirinya untuk mencapai sasaran bersama. Dua atau lebih perusahaan pada tingkatan yang sama bekerja sama untuk mempelajari peluang pemasaran yang baru.

b. Keputusan Rancangan Saluran

Keputusan rancangan saluran menjadi salah satu faktor yang memengaruhi saluran distribusi disebabkan adanya:

1. Analisis kebutuhan layanan jasa konsumen
2. Menetapkan tujuan dan kendala saluran
3. Identifikasi alternatif utama

c. Jenis Penyalur

Jenis penyalur dalam faktor yang memengaruhi saluran distribusi, antara lain:

1. Tenaga penjualan perusahaan
2. Agen pabrikan
3. Distributor industri

d. Banyaknya Saluran Pemasaran

Ada tiga strategi yang tersedia dalam saluran pemasaran , yaitu:

1. Distribusi intensif
 2. Distribusi eksklusif
 3. Distribusi selektif
- e. Tanggung Jawab Anggota Saluran
- Setiap perjanjian lisensi pasti ada persyaratan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemegang lisensi jika ingin memasarkan produk produsen. Elemen utama dalam bauran hubungan dagang adalah kebijakan harga, syarat penjualan, hak territorial, dan jasa tertentu yang harus dilaksanakan kedua belah pihak.
- f. Evaluasi Alternatif Utama
- Mengidentifikasi beberapa alternatif saluran dan ingin memilih salah satu yang paling memenuhi tujuan jangka panjang
- g. Merancang Saluran Distribusi Internasional
- Tiap-tiap sistem saluran dapat berbeda-beda antara satu negara dan negara lain. Oleh karena itu, pemasar harus mengadaptasikan strategi saluran dengan struktur yang telah ada di tiap-tiap negara.
- h. Keputusan Manajemen Saluran
1. Memilih Anggota Saluran
- Produsen harus memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan menarik perantara yang berkualitas tinggi, serta harus bekerja keras untuk memperoleh sejumlah perantara yang berkualitas.
2. Memotivasi Anggota Saluran

Perusahaan tidak hanya menjual melalui perantara, tetapi juga pada konsumen. Perusahaan memandang perantara pemasaran sebagai pelanggan tingkat utama.

3. Evaluasi Anggota Saluran

Produsen harus memeriksa secara berkala, membandingkan kinerja anggota saluran terhadap standar-standar, seperti tingkat persediaan barang, lama waktu pengiriman, perlakuan terhadap barang yang rusak, kerja sama dalam program promosi dan pelatihan, serta layanan jasa kepada pelanggan .

3. Sistem Integrasi Saluran

Saluran distribusi berkembang sangat pesat dengan berbagai sistem pemasaran berbeda. Ada tiga sistem pemasaran yang dikenal saat ini, yaitu sebagai berikut (Anggara, 2014:126).

1. Sistem Pemasaran Vertikal

Dalam praktiknya, sistem ini merupakan sistem kesatuan usaha secara vertical dari mulai produsen, pedagang besar besar, dan pengecer. Semua anggota saluran menyatu untuk memasarkan produk dengan kerja sama yang sangat rapi mulai produsen hingga barang sampai ke konsumen.

2. Sistem Pemasaran Horizontal

Sistem ini merupakan sistem gabungan perusahaan yang melakukan kerja sama untuk memanfaatkan peluang pasar. Misalnya, kerja sama dengan bank dalam hal transaksi atau pembayaran produk.

3. Sistem Pemasaran Multisaluran

Sistem ini merupakan sistem yang melayani berbagai segmen pelanggan. Perusahaan dikatakan memakai sistem ini apabila menggunakan dua atau lebih saluran pemasaran untuk melayani berbagai segmen pelanggan.

2.2.4 Fungsi Saluran Distribusi

Dalam pelaksanaan operasional pendistribusian, produsen memiliki mitra dalam hal pendistribusian yang dikenal sebagai distributor. Ada tiga fungsi yang dilakukan oleh mitra/distributor (Swastha, 1999) dalam (Suryanto, 2016:6).

1. Fungsi Pertukaran (*Transaction Function*)

Fungsi ini memerlukan adanya kegiatan transaksi antara dua pihak atau lebih, baik kegiatan transaksi yang dilakukan pihak mitra/distributor dengan pihak pelanggan maupun produsen. Fungsi dalam pertukaran tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian
- b. Penjualan
- c. Pengambilan Resiko

2. Fungsi Penyedia Fisik (*Logistical Function*)

Fungsi penyedia fisik terjadi setelah adanya proses distribusi, yakni perpindahan produk atau jasa dari produsen melalui mitra/distributor ke konsumen akhir. Ada empat macam yang dilakukan dalam penyedia fisik produk atau jasa, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan
- b. Penyimpanan
- c. Pemilihan

- d. Pengangkutan
3. Fungsi Penunjang (*Supporting Function*)
- Fungsi penunjang memiliki peranan membantu pelaksanaan fungsi lainnya, di antaranya adalah sebagai berikut.
- a. Pelayanan Purnajual
 - b. Pendanaan
 - c. Penyebaran Informasi
 - d. Koordinasi Saluran
 - e. Pembayaran

2.2.5 Menentukan Struktur Distribusi

Di dalam menyusun struktur distribusi, yang perlu di perhatikan adalah berikut ini (Suryanto, 2017:27).

- a. Mengkaji terlebih dahulu pola kerja tim distribusi, bukan saja untuk salesman, tetapi juga sales supervisor dan sales manager. Hal ini akan menentukan tingkat efektivitas dan rentang kendali yang perlu ditentukan sejak awal agar organisasi berjalan sesuai arah perusahaan, prioritas tugas yang dikehendaki, sistem pengendalian hingga menentukan kinerja di setiap jabatan dalam organisasi penjualan tersebut.
- b. Kualitas sumber daya manusia (SDM). Kompetensi setiap jabatan akan menentukan pula tingkat efektivitas dan produktivitas organisasi penjualan. Semakin tinggi kualitas SDM yang sesuai dengan kompetensi maka organisasi akan tampak ramping dan rentang kendalinya semakin ringan sehingga kemandirian menjalankan tugas semakin tinggi, dan para sales

- c. supervisor dan sales manager dapat mengalokasikan waktunya untuk hal-hal yang lebih strategis.
- d. Sistem penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja kunci (*key performance indicators*) tentunya harus bermula dari syarat awal jabatan, kompetensi jabatan, objektif pekerjaan, dan pengukuran kinerja. Sebaiknya pengukuran kinerja dilakukan secara periodic, misalnya bulanan. Di beberapa perusahaan, sistem penilaian kinerja karyawan dikaitkan pula dengan sistem insentif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Safrida, yang berjudul Implementasi Kebijakan Pendistribusian Gas Bersubsidi Bagi Masyarakat Miskin di Kecamatan Dewantara, yang dimuat pada jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 3 Nomor 3 (September 2016) (34-60) ISSN 2460-8076. Metode penelitian ini merupakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian, berdasarkan hasil penelitian serta pendapat para informan maka pada bab ini diambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Implementasikan kebijakan pendistribusian gas (LPG) bersubsidi bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara belum terwujud secara efektif, karena sistem pendistribusiannya menganut sistem terbuka, sehingga warga masyarakat tingkat menengah dan keatas memperoleh gas bersubsidi secara bebas dan terbuka tanpa ada batasan. 2) Hambatan dalam implementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi bagi masyarakat miskin di Kecamatan Dewantara adalah sistem

pendistribusian yang kurang tepat yaitu sistim terbuka, adanya permintaan

pihak tertentu untuk memperoleh gas bersubsidi dalam jumlah tidak terbatas, lemahnya penegakan hukum, persyaratan yang tidak konsisten, terjadi kelangkaan gas bersubsidi di pasar (Safrida, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pendistribusian gas bersubsidi bagi masyarakat miskin sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Dwi Astuti Labiba dan Rizky Wulan Juliani, yang berjudul Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur, yang dimuat pada jurnal Wawasan Yuridika fakultas Hukum Vol. 2 | No. 1 | Maret 2018 | Halaman: 43-56. ISSN 2549-0664. Metode penelitian ini merupakan Yuridis Normatif. Hasil penelitian Prosedur pelaksanaan pendistribusian gas elpiji yaitu: terdapat proses pendistribusian dengan cara memanfaatkan teknologi sistem informasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kemana saja gas elpiji tersebut didistribusikan oleh agen, daerah mana saja yang mengkonsumsi gas elpiji tersebut dan berapa jumlahnya sehingga Pertamina dapat mengetahui kebutuhan pasokan gas elpiji pada setiap agen di wilayah tersebut, yang pada akhirnya diharapkan proses pendistribusian gas akan lebih cepat, akurat, agen dapat bekerja secara baik, efektif, dan efisien. Proses pendistribusian tersebut yaitu, diawali dari agen yang kemudian agen akan mendistribusikan gas elpiji

kepada pangkalan/sub agen, yang akhirnya sampai ke tangan konsumen ataupun pengecer (Labiba & Juliani, 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum tentang penataan pendistribusian gas elpiji 3 kilogram pada pangkalan gas elpiji sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Stefanus Bonifasius Pasumah dkk yang berjudul Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bitung Dalam Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Solar Industri PT. Stemar Jaya yang dimuat pada jurnal jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 (1-9) ISSN : 2337 – 5736. Metode penelitian Kualitatif. Hasil penelitian dalam melakukan aktivitasnya sebagai pengawas dalam bidang Perindustrian dan Perdagangan, maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, faktor-faktor tersebut dapat meliputi: aparat pengawasan dan sarana/prasarana. Dalam hubungan dengan uraian tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan Kasi Perdagangan dan Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut: “Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Barang dan Jasa yang ada di Kota Bitung sangat di tunjang oleh adanya kompetensi aparatur dan disamping itu tersedianya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan“ (Pasumah et al., 2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian

ini berfokus pada pengawasan pendistribusian bahan bakar minyak solar industri PT. Stemar Jaya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Bitung sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

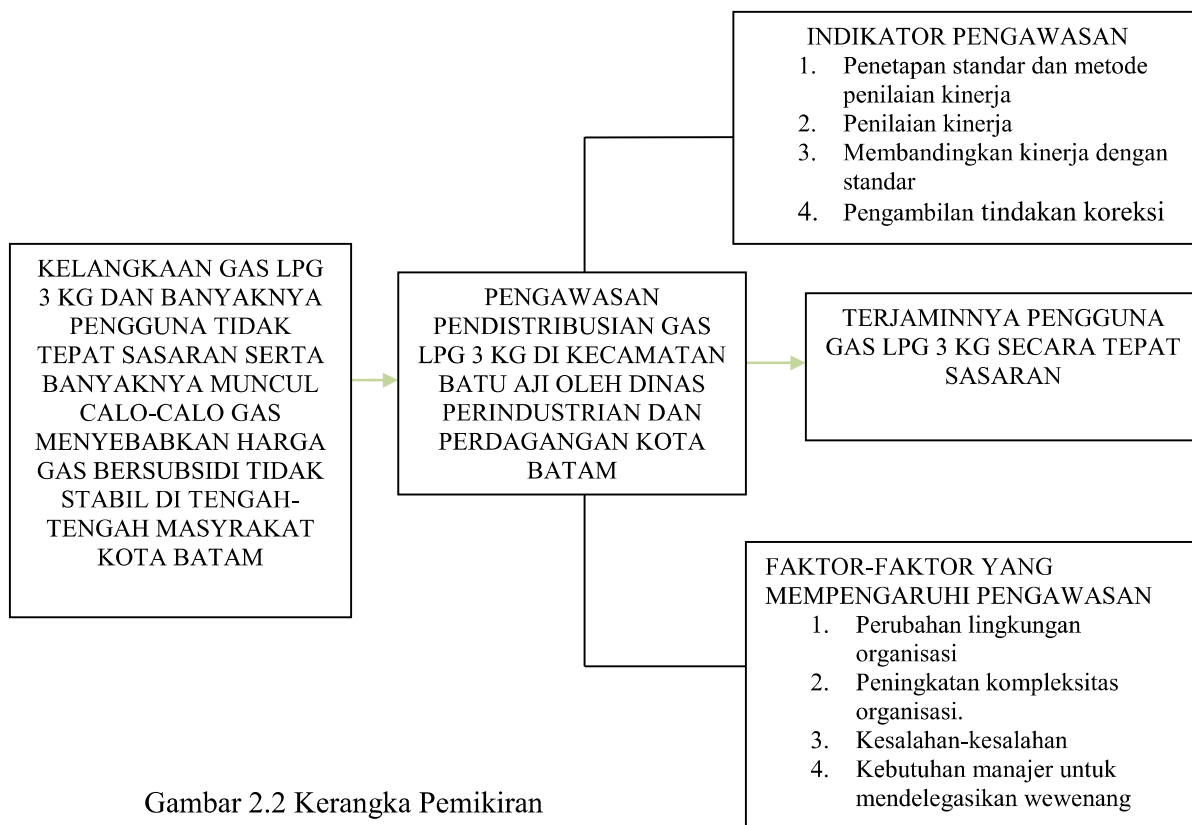
4. Penelitian yang dilakukan oleh Six'on Demokrat Suroso yang berjudul Studi Tentang Fungsi Seksi Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dalam Pengawasan dan Penyidikan Pada Alat Ukur Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Untuk Masyarakat Kota Samarinda yang dimuat pada jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4, Nomor 1, 2016 (383-397) ISSN 2477-2631. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, dalam penelitian ini, dimana peran dari Seksi Metrologi Legal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi yang tidak kalah pentingnya dan Seksi Metrologi Legal dalam pengawasan dan penyidikannya telah melaksanakan dengan baik. Ini dapat dilihat dari pengawasan rutin yang dilakukan 3 bulan sekali. Tentunya diharapkan dalam pengawasan Seksi Metrologi Legal kepada setiap SPBU khususnya pada SPBU yang berada di Kecamatan Palaran tidak ada kecurangan, karena bila terjadi kecurangan maka masyarakatlah yang sangat- sangat dirugikan. Meningkatnya jumlah pertumbuhan SPBU tentunya membawa pengaruh yang baik bagi perekonomian Kota Samarinda. Disinilah peran penting dari Seksi Metrologi Legal sebagai Instansi Pemerintahan yang bertugas untuk

melaksanakan fungsinya dalam hal melakukan pengawasan dan penyidikan kepada setiap SPBU agar nantinya berjalan dengan baik dan dapat memberikan sebuah kepuasan kepada setiap pelanggannya (Suroso, 2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada pengawasan dan penyidikan pada alat ukur stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di kota Samarinda sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dkk yang berjudul Implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Terhadap Uji Alat Ukur Lpg 3 Kg Di SPPBE Kota Samarinda yang dimuat pada jurnal Jurnal Beraja Niti Fakultas Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 8 Tahun 2014 (1-16) ISSN : 2337-4608. Metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Implementasi pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal terhadap uji alat ukur elpiji 3 kg di SPPBE kota Samarinda masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini didasarkan pada hasil kegiatan kemetrologian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Seksi Metrologi Kota Samarinda yang mengemban tugas memberikan perlindungan kepada masyarakat mengenai kebenaran pengukuran dan kepastian huum di dunia usaha sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1981 tentang Metrologi Legal. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapatnya tabung elpiji 3 kg yang isinya tidak sesuai dengan yang tertera pada label dan telah melewati batas toleransi (Lisi, Susanti, & Wahyudi, 2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dimana penelitian ini berfokus pada implementasi pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal terhadap uji alat ukur LPG 3 kg Di SPPBE kota Samarinda sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran
(Sumber: Hasil Penelitian 2018-2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Sugiyono, (2014) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, di mana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Dengan kata lain metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan jalan memaparkan data secara kata-kata, dan gambar. Tujuan penulis menggunakan metode tersebut adalah untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang pengawasan pendistribuisan gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Fokus penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian karena dapat memberikan batasan bagi peneliti dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti dapat lebih fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian dan data yang

diperoleh akan lebih spesifik. Spradley (Sugiyono, 2014: 209) menjelaskan fokus dalam penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang saling terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis masalah ini, maka penelitian ini difokuskan pada pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Batu Aji oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam.

3.3. Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata - kata atau citra. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Pasolong, 2013):

1. Data Primer

Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan informan yang sudah ditentukan dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen- dokumen tertulis yang terkait dengan pelaksanaan pajak online dalam administrasi perpajakan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi (Sugiyono, 2014):

a. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan digunakan untuk mendapatkan data-data primer yang berupa deskripsi faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial, serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi dan berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat dalam pengawasan pendistribusian gas lpg 3 kg oleh dinas perindustrian dan perdagangan kota Batam

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjangkau data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (interview guide), maupun wawancara bebas (tidak terstruktur) bersamaan dengan observasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah tape recorder atau voice recorder, dimana dilengkapi juga dengan catatan-catatan kecil peneliti. Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengembangan pendistribusian dan pengawasan yang dilakukan oleh dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg.

Tabel 3.1 Daftar Informan Wawancara

No	Nama	Jabatan
1	Andri Nurahman	Kepala Seksi ESDM Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Edison	Agen Gas LPG 3 kg
3	Agus Sutono	Agen Gas LPG 3 kg
4	Sutarko	Agen Gas LPG 3 kg
5	Retno	Agen Gas LPG 3 kg
6	Sukarno	Agen Gas LPG 3 kg
7	Ennih	Masyarakat
8	Uwo	Masyarakat
9	Erna	Masyarakat
10	Sutarmi	Masyarakat
11	Maya	Masyarakat
12	Sari	Masyarakat
13	Reni	Masyarakat

(Sumber: Hasil Observasi Penelitian 2018-2019)

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip- arsip yang dimiliki oleh Disperindag, dari website disperindag.batam.go.id, serta literatur-literatur yang mendukung dan sesuai dengan bahasan penelitian.

3.5. Metode Analisis Data

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014), mengemukakan bahwa ada komponen-komponen aktivitas yang terdapat didalam sebuah analisis data

kualitatif yang dilakukan secara terus menerus hingga tuntas sehingga didapat sebuah data yang akurat. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data (*reduction data*).

Reduksi data diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian dituangkan dalam uraian yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan selanjutnya direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal - hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.

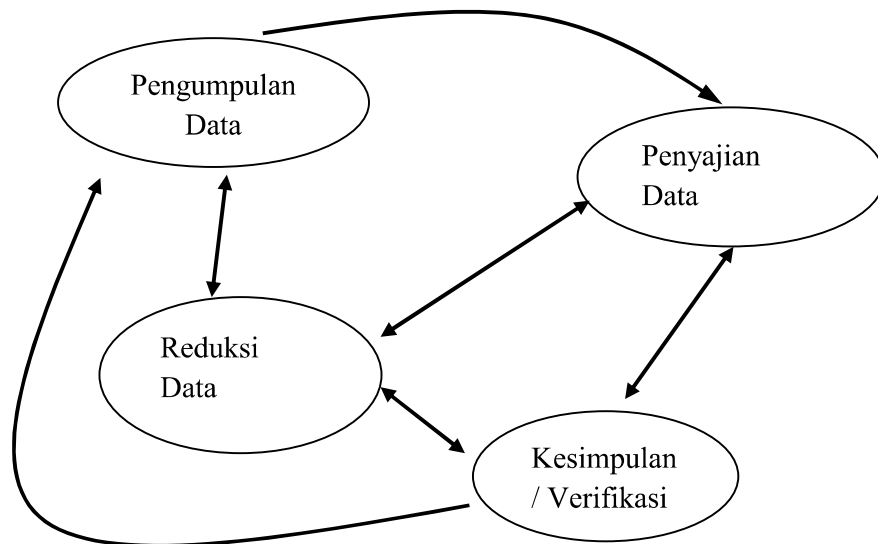
2. Penyajian Data (*Data Display*).

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan verifikasi yang dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk

menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang kemudian dituangkan dalam kesimpulan. Ketiga hal diatas dapat dilihat dengan bagan alur pemikiran sebagai berikut:



Gambar 3.1 Alur Analisis Data
(Sumber: Sugiyono, 2014:24)

3.6 Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh, mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria (Sugiyono, 2014):

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil - hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada sumber yang berbeda. Informan tersebut berasal dari elemen yang berbeda. Informan-informan tersebut, yaitu dari pihak aparaturnya Disperindag kota Batam, dan masyarakat yang menggunakan tabung gas LPG 3 kg.

b. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensidan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini penulis melakukan dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

1. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai

lewat uraian yang cermat, rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan.

konteks antara pengirim dan penerima. Dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci.

2. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penulis seperti ini perlu diuji dependabilitynya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

3. Kepastian

Menguji kepastian (confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Pada derajat ini, diperoleh peneliti dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil penelitiannya.

3.7. Lokasi dan Jadwal Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yaitu dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Batam, Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Batam merupakan salah satu dinas yang melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas LPG 3 kg.

b. Jadwal Penelitian

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																				
		Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2018				Februari 2019				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Studi Pustaka	■	■	■																		
2.	Penyusunan Proposal	■	■	■																		
3.	Pengumpulan Data				■	■	■	■	■													
4.	Pengolahan Data									■	■	■	■	■								
5.	Analisis Hasil Penelitian														■	■	■					
6.	Penyusunan Laporan														■	■	■					
7.	Penyerahan Laporan																		■	■	■	■
8.	Sidang Hasil																		■	■	■	■